PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TOP UP PNBP

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

CATATAN HASIL REVIU ATAS USULAN REVISI
PENYESUAIAN BELANJA PEGAWAI YANG BERASAL DARI BLOKIR AA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Disusun oleh/Tanggal	Priyanto, S.T. (Ketua Tim) Juli 2023 .....
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Diteliti oleh/Tanggal	Heryana, S.Hut., M.Ak. (Pengendali Teknis) Juli 2023 .....
	Disetujui oleh/Tanggal	Moh. Noor Andi Kusumah, S.T.,M.Sc. (Inspektur Wilayah III) Juli 2023 .....

Uraian Catatan Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ST.51/ITWIL.3/TU/WAS/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 untuk melaksanakan Reviu Revisi Penyesuaian Belanja Pegawai Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut.

DATA UMUM

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Induk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK) Nomor SP DIPA-029.10-0/2023, tanggal 30 November 2022, Ditjen PHLHK pada tahun anggaran 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.517.452.613.000,00 (Lima Ratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

Sumber Dana	Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah)				Jumlah total (dalam ribuan rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	
Rupiah Murni	152.312.083	156.241.976	9.138.748	-	317.692.807
PNBP		165.386.881	34.372.925	-	199.759.806
BLU	-	-	-	-	-
PLN	-	-	-	-	-
HLN	-	-	-	-	-
PDN	-	-	-	-	-
SBSN	-	-	-	-	-
Jumlah	152.312.083	321.628.857	43.511.673	-	517.452.613

Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.701/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* (*AA*) dan Rencana Relaksasi Belanja Kementerian LHK TA 2023 dilakukan relokasi pagu anggaran belanja pegawai yang masih terblokir ke BA BUN pada Ditjen PHLHK senilai Rp.6.354.222.000,00 sehingga menjadi Rp.511.098.391.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Sumber Dana	Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah)				Jumlah total (dalam ribuan rupiah)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	
Rupiah Murni	145.957.861	156.241.976	9.138.748	-	311.338.585
PNBP	-	165.386.881	34.372.925	-	199.759.806
BLU	-	-	-	-	-
PLN	-	-	-	-	-
HLN	-	-	-	-	-
PDN	-	-	-	-	-
SBSN	-	-	-	-	-
Jumlah	145.957.861	321.628.857	43.511.673	-	511.098.391

HASIL REVIU

Berdasarkan hasil reviu, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka Pengembalian sisa pagu anggaran belanja pegawai yang masih terbokir AA kepada Bendahara Umum Negara (BUN) sebagaimana tertuang dalam:
   a. Surat Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.701/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* (AA) dan Rencana Relaksasi Belanja Kementerian LHK TA 2023;
   b. Surat Direktur Jenderal PHLHK Nomor S.221/PHLHK/SET.10/KEU.0/11/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Usulan Revisi Realokasi Anggaran Blokir *Automatic Adjustment* (AA) Ditjen PHLHK Kementerian LHK TA 2022;
   c. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PHLHK Nomor S.792/SET.10/PEHKT/KEU.1/11/2022 tanggal 24 November 2022 perihal permohonan reviu APIP Revisi Realokasi Anggaran Blokir *Automatic* Adjustment (AA) Ditjen PHLHK TA 2022;
   d. Surat Sekretaris Ditjen PHLHK Nomor S.459/SET.10/PEHKT/KEU.1.1/7/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Permohonan Reviu APIP Revisi Penyesuaian Belanja Pegawai Ditjen PHLHK TA 2023.
2. Revisi anggaran dilakukan terhadap satker Kantor Pusat Ditjen PHLHK berupa pengurangan pagu anggaran yang terblokir AA.
3. Revisi anggaran mengakibatkan pengurangan Pagu Belanja Pegawai pada Ditjen PHLHK senilai Rp6.354.222.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

(xRp1000)

No.	Satuan Kerja	Anggaran		Jumlah anggaran penyesuaian (Rp)
		Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	
1	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wil Sumatera			
	51	27.550.000	27.550.000	-
	52	30.168.984	30.168.984	-
	53	4.202.100	4.202.100	-
	Total	61.921.084	61.921.084	-

2	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wil Jawa Bali Nusra			
	51	23.500.000	23.500.000	-
	52	26.684.291	26.684.291	-
	53	7.537.432	7.537.432	-
	Total	57.721.723	57.721.723	-
3	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wil Kalimantan			
	51	23.800.000	23.800.000	-
	52	30.093.821	30.093.821	-
	53	4.377.000	4.377.000	-
	Total	58.270.821	58.270.821	-
4	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wil Sulawesi			
	51	22.500.000	22.500.000	-
	52	24.260.232	24.260.232	-
	53	2.339.977	2.339.977	-
	Total	49.100.209	49.100.209	-
5	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wil Maluku Papua			
	51	16.400.000	16.400.000	-
	52	22.291.089	22.291.089	-
	53	3.850.000	3.850.000	-
	Total	42.541.089	42.541.089	-
6	Kantor Pusat PHLHK			
	51	38.562.083	32.207.861	(6.354.222)
	52	188.130.440	188.130.440	-
	53	21.205.164	21.205.164	-
	Total	247.897.687	247.897.687	-
Jumlah Total		**517.452.613**	**511.098.391**	**(6.354.222)**

4. Perubahan pagu anggaran tidak berpengaruh terhadap target kinerja pada Ditjen PHLHK.
5. Terhadap usulan revisi anggaran tersebut telah dilengkapi dengan data dukung berupa:
   a. Matriks perubahan semula – menjadi;
   b. ADK SAKTI;
   c. Form A dan B;
   d. Copy DIPA Terakhir;
   e. Rincian Kertas Kerja, dan
   f. Dokumen pendukung lainnya
6. Revisi yang diajukan oleh Sekretaris Ditjen PHLHK merupakan revisi yang memerlukan penelaahan Direktorat Jenderal Anggaran.

Kesimpulan:

Berdasarkan kondisi di atas disimpulkan bahwa pengurangan pagu anggaran blokir AA senilai senilai Rp.6.354.222.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan karena dasar hukum pengalokasiannya dan dokumen pendukung terkait telah terpenuhi.

Rekomendasi	
Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin bahwa usulan revisi anggaran pada satker lingkup Direktorat Jenderal PHLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2023.	
Sekretaris Direktorat Jenderal PHLHK, Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., M.B.A. NIP 19760108 200312 1 005	Jakarta, Juli 2023 Pengendali Teknis Heryana, S.Hut., M.Ak. NIP 19790127 200501 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A.

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Juni 2023

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**Pihak Pertama,** Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM NIP 19660711 199203 1 018	Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A. NIP. 19760108 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efesien lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78 Poin	78 Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Level	4 Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Huku Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	1 Laporan

Kegiatan :	**Anggaran Semula:**	**Anggaran Menjadi**
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakan LHK	Rp. 60.792.527.000,-	Rp. 95.557.307.000,-

Jakarta, 12 Juni 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A.

NIP. 19760108 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M.

Jabatan : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, 6 Juni 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM	Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M.
NIP 19660711 199203 1 018	NIP 19640603 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	30 Perkara	56 Perkara

Kegiatan:	Anggaran Semula:	Anggaran Menjadi:
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Rp. 11.743.080.000,-	Rp. 29.750.660.000,-

Jakarta, 6 Juni 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M.
NIP 19640603 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M.

Jabatan : Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Juni 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK
Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM	Ardyanto Nugroho,S.Hut.,MM
NIP 19660711 199203 1 018	NIP 19800331 200312 1 000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	233 Badan Usaha	423 Badan Usaha
		Jumlah penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan	50 Badan usaha	50 Badan usaha
		Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya	170 Orang	370 Orang

Kegiatan :	Anggaran Semula:	Anggaran Menjadi
Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 15.077.316.000,-	Rp. 26.242.886.000,-

Jakarta, 12 Juni 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK

Ardyanto Nugroho,S.Hut.,MM
NIP 19800331 200312 1 000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
Jabatan : Plt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Juni 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	22 Operasi	26 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	6 Operasi	6 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	135 Orang	135 Orang

Kegiatan :	Anggaran Semula:	Anggaran Menjadi
Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 21.957.035.000,-	Rp. 43.480.852.000,-

Jakarta, 12 Juni 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Rasio Ridho Sani, M. Com, MPM

NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Plt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. Sustyo Iriyono, M.Si

NIP. 19620621 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazid Nurhuda, S.H., M.A

Jabatan : Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Juni 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Penegakan Hukum Pidana,
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Yazid Nurhuda, S.H., M.A
NIP 19681209 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	15 Perkara	15 Perkara
		Jumlah Penanganan Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan yang ditindaklanjuti	60 Perkara	250 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	155 Orang	155 Orang

Kegiatan :	Anggaran Semula:	Anggaran Menjadi
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutana	Rp. 18.086.582.000,-	Rp. 53.040.982.000,-

Jakarta, 6 Juni 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Yazid Nurhuda, S.H., M.A
NIP 19681209 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subhan, S.Hut, M.Si

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, 19 Juni 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera

Subhan, S.Hut, M.Si
NIP. 19730320 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya Operasi Pengamanan Hutan, Perusakan Lingkungan Hidup dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Perusakan Lingkungan Hidup	3 Operasi	11 Operasi
		Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	4 Operasi	4 Operasi
		Jumlah Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	15 Orang
2	Meningkatnya Pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap	140 Badan Usaha	180 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang
3	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	-	1 Perkara
4	Meningkatnya kasus tindak lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan dengan P-21	Jumlah Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan dengan P-21	35 Perkara	35 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	5 Orang
5	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efesien lingkup Ditjen PHLHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan

Kegiatan :	**Anggaran Semula:**	**Anggaran Menjadi**
1. Pencegahan Pengamanan LHK	Rp. 3.945.684.000,-	Rp. 7.289.964.000,-
2. Penanganan PPSA LHK	Rp. 4.788.000.000,-	Rp. 6.137.120.000,-
3. Penyelesaian Sengketa LH	Rp. -	Rp. 1.000.000.000,-
4. Penegakan Hukum Pidana LHK	Rp. 8.835.700.000,-	Rp. 8.835.700.000,-
5. Dukungan Manajemen	Rp. 33.754.700.000,-	Rp. 38.658.300.000,-
Total Anggaran	**Rp. 51.324.084.000,-**	**Rp. 61.921.084.000,-**

Jakarta, 19 Juni 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera

Subhan, S.Hut, M.Si

NIP. 19730320 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taqiuddin, S.Hut., M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, 15 Juni 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Taqiuddin, S.Hut., M.P.
NIP. 19740628 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya Operasi Pengamanan Hutan, Perusakan Lingkungan Hidup dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Perusakan Lingkungan Hidup	3 Operasi	6 Operasi
		Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	4 Operasi	5 Operasi
		Jumlah Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	15 Orang
2	Meningkatnya Pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap	124 Badan Usaha	159 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang
3	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	-	2 Perkara
4	Meningkatnya kasus tindak lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan dengan P-21	Jumlah Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan dengan P-21	31 Perkara	31 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	5 Orang
5	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efesien lingkup Ditjen PHLHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan

Kegiatan :	**Anggaran Semula:**	**Anggaran Menjadi**
1. Pencegahan Pengamanan LHK	Rp. 3.705.000.000,-	Rp. 5.643.618.000,-
2. Penanganan PPSA LHK	Rp. 3.345.500.000,-	Rp. 4.445.500.000,-
3. Penyelesaian Sengketa LH	Rp. -	Rp. 2.000.000.000,-
4. Penegakan Hukum Pidana LHK	Rp. 10.640.000.000,-	Rp. 10.640.000.000,-
5. Dukungan Manajemen	Rp. 29.866.223.000,-	Rp. 35.172.605.000,-
Total Anggaran	Rp. 47.376.723.000,-	Rp. 57.721.723.000,-

Jakarta, 15 Juni 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Taqiuddin, S.Hut., M.P.

NIP 19740628 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Muhammad, S.Sos, M.H

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Wilayah Kalimantan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, 12 Juni 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan
Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM	David Muhammad, S.Sos, M.H
NIP 19660711 199203 1 018	NIP. 197307072000031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya Operasi Pengamanan Hutan, Perusakan Lingkungan Hidup dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Perusakan Lingkungan Hidup	18 Operasi	21 Operasi
		Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	5 Operasi	5 Operasi
		Jumlah Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	15 Orang
2	Meningkatnya Pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap	134 Badan Usaha	164 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang
3	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	-	2 Perkara
4	Meningkatnya kasus tindak lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan dengan P-21	Jumlah Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan dengan P-21	38 Perkara	38 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	5 Orang
5	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efesien lingkup Ditjen PHLHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan

Kegiatan :	**Anggaran Semula:**	**Anggaran Menjadi**
1. Pencegahan Pengamanan LHK	Rp. 6.195.000.000,-	Rp. 8.911.250.000,-
2. Penanganan PPSA LHK	Rp. 3.611.000.000,-	Rp. 5.036.750.000,-
3. Penyelesaian Sengketa LH	Rp. -	Rp. 1.500.000.000,-
4. Penegakan Hukum Pidana LHK	Rp. 9.520.000.000,-	Rp. 9.520.000.000,-
5. Dukungan Manajemen	Rp. 27.975.821.000,-	Rp. 33.302.821.000,-
Total Anggaran	Rp. 47.301.821.000,-	Rp. 58.270.821.000,-

Jakarta, 12 Juni 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan

David Muhammad, S.Sos, M.H
NIP. 197307072000031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aswin Bangun, S.Hut.,M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Makassar, 26 Juni 2023

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**Pihak Pertama,** Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi
Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM NIP 19660711 199203 1 018	Aswin Bangun, S.Hut.,M.Si NIP. 19740228 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya Operasi Pengamanan Hutan, Perusakan Lingkungan Hidup dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Perusakan Lingkungan Hidup	3 Operasi	7 Operasi
		Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	4 Operasi	6 Operasi
		Jumlah Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	35 Orang
2	Meningkatnya Pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap	87 Badan Usaha	87 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang
3	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	-	2 Perkara
4	Meningkatnya kasus tindak lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan dengan P-21	Jumlah Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan dengan P-21	28 Perkara	28 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	5 Orang
5	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efesien lingkup Ditjen PHLHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Sarana Internal	-	1 Unit

Kegiatan :	**Anggaran Semula:**	**Anggaran Menjadi:**
1. Pencegahan Pengamanan LHK	Rp. 3.400.000.000,-	Rp. 6.528.263.000,-
2. Penanganan PPSA LHK	Rp. 3.200.000.000,-	Rp. 3.200.000.000,-
3. Penyelesaian Sengketa LH	Rp. -	Rp. 1.500.000,000,-
4. Penegakan Hukum Pidana LHK	Rp. 7.746.423.000,-	Rp. 7.746.423.000,-
5. Dukungan Manajemen	Rp. 26.956.944.000,-	Rp. 30.125.523.000,-
Total Anggaran	Rp. 41.303.367.000,-	Rp. 49.100.209.000,-

Makassar, 26 Juni 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.

NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi

Aswin Bangun, S.Hut.,M.Si.

NIP. 19740228 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leonardo Gultom, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, 14 Juni 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Mapua

Leonardo Gultom, S.Sos.,M.Si
NIP. 19750610 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya Operasi Pengamanan Hutan, Perusakan Lingkungan Hidup dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Perusakan Lingkungan Hidup	2 Operasi	2 Operasi
		Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	2 Operasi	2 Operasi
		Jumlah Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	15 Orang
2	Meningkatnya Pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap	32 Badan Usaha	32 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang
3	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	-	1 Perkara
4	Meningkatnya kasus tindak lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan dengan P-21	Jumlah Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan dengan P-21	13 Perkara	13 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	5 Orang
5	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efesien lingkup Ditjen PHLHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan

Kegiatan :	**Anggaran Semula:**	**Anggaran Menjadi :**
1. Pencegahan Pengamanan LHK	Rp. 8.100.000.000,-	Rp. 8.100.000.000,-
2. Penanganan PPSA LHK	Rp. 2.034.000.000,-	Rp. 2.034.000.000,-
3. Penyelesaian Sengketa LH	Rp. -	Rp. 1.000.000,000,-
4. Penegakan Hukum Pidana LHK	Rp. 6.560.910.000,-	Rp. 6.560.910.000,-
5. Dukungan Manajemen	Rp. 20.296.179.000.-	Rp. 24.846.179.000.-
Total Anggaran	Rp. 36.991.089.000,-	Rp. 42.541.089.000,-

Jakarta, 14 Juni 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Mapua

Leonardo Gultom. S.Sos.,M.Si
NIP. 19750610 200003 1 002

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2023

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4
Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta